



PENUNTASAN PENGANGKATAN CASN HASIL SELEKSI TAHUN 2024

Nurfadhilah Arini*

Abstrak

Percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 telah diumumkan oleh Pemerintah. Keputusan ini diambil setelah pemerintah menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait kebijakan penyesuaian jadwal pengangkatan yang sebelumnya. Tulisan ini akan menganalisis tentang penuntasan pengangkatan CASN dengan menguraikan potensi dampak yang dapat timbul jika proses tersebut tidak segera diselesaikan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penundaan pengangkatan CASN 2024 dapat menimbulkan efek beruntun dalam sektor ekonomi, sosial dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, percepatan pengangkatan CASN tahun 2024 merupakan langkah strategis yang diperlukan. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi II perlu memastikan bahwa pengangkatan CASN tahun 2024 dilakukan sesuai jadwal percepatan yang telah ditentukan, serta mendorong koordinasi antarinstansi pemerintah untuk mengawal kesiapan instansi dalam menuntaskan pengadaan CASN tahun 2024.

Pendahuluan

Pemerintah akan mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) hasil seleksi tahun 2024. Calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan diangkat paling lambat pada Juni 2025, sementara pengangkatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dijadwalkan selesai paling lambat pada Oktober 2025 (Kementerian Sekretariat Negara, 2025). Keputusan tersebut diambil setelah Pemerintah menerima masukan berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun 2024 yang sebelumnya disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Sebelumnya, Kementerian PANRB mengeluarkan pernyataan bahwa jadwal pengangkatan bagi CPNS menjadi 1 Oktober 2025, serta PPPK menjadi 1 Maret 2026. Alasannya, perubahan jadwal tersebut dilakukan untuk menyeragamkan tanggal pengangkatan CASN, serta menyediakan waktu bagi instansi pemerintah dalam menyelaraskan data CASN (Susilo & Rahayu, 2025). Namun demikian, kebijakan ini memicu respons publik, termasuk para peserta yang telah dinyatakan lulus (BBC News Indonesia, 2025).

*) Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: nurfadhilah.arini@dpr.go.id

Publik menilai perubahan jadwal pengangkatan memunculkan ketidakpastian, khususnya bagi CASN yang terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya. Selain itu, beberapa peserta seleksi juga telah memutuskan untuk tidak melanjutkan studinya atau terlanjur mengurus perpindahan domisili ke lokasi mereka diterima (Ristiyanti, 2025a).

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan menganalisis tentang penuntasan pengangkatan CASN dengan menguraikan potensi dampak yang dapat timbul jika proses tersebut tidak segera diselesaikan serta tindakan yang dilakukan pemerintah. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penuntasan pengangkatan CASN tahun 2024.

Potensi Dampak Penundaan Pengangkatan CASN Tahun 2024

Seleksi CASN tahun 2024 diselenggarakan untuk mengisi 248.970 formasi CPNS dan 1.017.111 formasi PPPK (Kementerian PANRB, 2025a). Dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 5 juta orang, sebanyak 1,2 juta dinyatakan lulus seleksi. Hal ini menjadikan seleksi ASN tahun 2024 sebagai seleksi terbesar sepanjang sejarah Indonesia (Susilo & Rahayu, 2025).

Dengan merujuk data kelulusan peserta, setidaknya terdapat 1,2 juta orang yang menerima dampak langsung dari kebijakan pengangkatan CASN tahun 2024. Artinya, keputusan mengenai jadwal pengangkatan CASN bukan hanya menyangkut proses administratif, tetapi juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi jutaan individu beserta keluarganya. Kebijakan pengangkatan CASN 2024 ini juga tidak hanya memengaruhi individu yang dinyatakan lulus, tetapi juga akan berimplikasi terhadap pasar tenaga kerja, konsumsi rumah tangga, hingga produktivitas instansi pemerintah yang mengalami kekurangan pegawai. Dengan demikian, kebijakan pengangkatan CASN juga akan berdampak pada keberlangsungan pelayanan publik.

Pada konteks ekonomi, misalnya, studi yang dilakukan CELIOS (2025) menggambarkan bagaimana penundaan pengangkatan CASN dapat menimbulkan efek beruntun. Dengan asumsi pendapatan ASN sebesar Rp3 juta per bulan dan menghitung jumlah formasi CPNS sebanyak 250.407, maka terdapat Rp6,76 triliun total pendapatan CPNS yang berpotensi hilang apabila pengangkatan ditunda hingga Oktober 2025. Tidak hanya berdampak kepada CPNS, jadwal pengangkatan CPNS yang ditunda hingga Oktober 2025 juga berpotensi memunculkan kerugian total output ekonomi mencapai Rp11,9 triliun (Adhinegara & Huda, 2025).

Pengangkatan CASN yang ditunda hingga Oktober 2025 dan Maret 2026 juga berpotensi menambah angka pengangguran, khususnya bagi mereka yang terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya (Nastitie, 2025a). Kondisi ini tentu akan berimbas kepada pasar tenaga kerja dan daya beli masyarakat yang secara lebih lanjut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penundaan pengangkatan CASN tahun 2024 juga dikhawatirkan akan memengaruhi pelayanan publik. Ombudsman melaporkan bahwa sejumlah pemerintah daerah harus bersiap mengalami kekurangan pegawai, jika pengangkatan ditunda hingga Oktober 2025 dan Maret 2026. Salah satu provinsi bahkan telah membuka sekitar 4.000 formasi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan jumlah tenaga kerjanya. Pemerintah daerah juga terlanjur melepas tenaga honorer karena telah mendapat pegawai dari jalur CASN, sehingga penundaan pengangkatan akan berakibat pada kekosongan pegawai (Ristiyanti, 2025b). Kondisi tersebut tidak hanya menambah beban kerja bagi pegawai yang telah ada, tetapi juga dapat menurunkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik.

Menteri PANRB menjelaskan bahwa pengangkatan CASN memang perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati, terutama karena kebutuhan untuk menyelaraskan data formasi, jabatan, dan penempatan menyebabkan instansi pemerintah memerlukan waktu dalam menuntaskan pengadaan CASN tahun 2024 (Kementerian PANRB, 2025b). Namun demikian, keputusan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan merupakan langkah krusial dan strategis, sebab penundaan lebih lanjut berpotensi memunculkan efek domino.

Penuntasan Pengangkatan CASN Tahun 2024

Salah satu alasan utama dilakukannya penuntasan pengangkatan CASN tahun 2024 ialah untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan secara optimal. Dengan menuntaskan pengangkatan CASN tahun 2024 maka kekurangan pegawai di sejumlah instansi pemerintahan dapat segera teratasi, terutama pada sektor-sektor krusial seperti kesehatan dan pendidikan. Contohnya pada kasus di Puskesmas Wajok Hulu, Kabupaten Mempawah, yang menunjukkan kondisi kurang tenaga medis, namun dua bidan yang telah dinyatakan lolos seleksi CASN belum dapat memenuhi kebutuhan petugas medis karena masih menunggu pengangkatan secara resmi. Akibat terbatasnya jumlah tenaga medis menyebabkan Puskesmas Wajok Hulu harus meminjam tenaga dari puskesmas lain yang berdekatan dengan wilayah mereka (Nastitie, 2025b).

Penuntasan pengangkatan CASN tahun 2024 juga dilakukan untuk menjamin ketaatan administrasi di bidang pelayanan pegawai. Sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan Ombudsman RI, penundaan pengangkatan CASN berpotensi menimbulkan praktik maladministrasi (Ombudsman RI, 2025). Penuntasan pengangkatan CASN tahun 2024 dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen ASN yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, keputusan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CASN tahun 2024 merupakan langkah strategis yang dibutuhkan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian bagi peserta seleksi CASN, tetapi juga mencegah dampak yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi dan pelayanan publik.

Hal yang perlu menjadi perhatian ialah faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun 2024. Salah satu faktornya ialah karena sejumlah instansi pemerintah menyatakan belum siap untuk melaksanakan pengangkatan ASN. Setidaknya terdapat 213 instansi pemerintah yang sebelumnya mengajukan penundaan pengangkatan CASN tahun 2024 karena berbagai alasan dan kebutuhan (Marwah, 2025).

Menanggapi hal tersebut sebagaimana arahan yang telah diberikan oleh Presiden, proses pengangkatan CASN tahun 2024 perlu ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah dan instansi (Kementerian Sekretariat Negara, 2025). Jika instansi pemerintah telah siap melakukan pengangkatan pada April 2025, maka pengangkatan CASN dapat dilakukan segera mungkin. Sementara bagi instansi yang belum siap, terdapat waktu untuk mempersiapkan pengangkatan selama tiga bulan bagi CPNS dan tujuh bulan bagi PPPK. Pada rentang waktu tersebut, instansi pemerintah dapat melakukan pemanggilan, salah satunya untuk orientasi (Salam, 2025). Penting untuk memastikan transparansi mengenai alasan ketidaksiapan dari instansi-instansi yang menyatakan belum dapat melakukan pengangkatan, sehingga memberikan kepastian dan kejelasan bagi CASN.

Selain itu, komitmen dari pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta instansi juga merupakan tantangan yang perlu diantisipasi. Penting bagi pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa arahan untuk mempercepat pengangkatan CASN tahun 2024 ditindaklanjuti oleh seluruh instansi pemerintah. Sebagaimana arahan Presiden, instansi pemerintah harus segera menyusun perencanaan pengangkatan melalui simulasi atau analisis yang mempertimbangkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengangkat CASN. Petunjuk teknis yang jelas juga diperlukan, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap instansi berkomitmen menjalankan percepatan pengangkatan secara optimal sehingga pelayanan publik tetap terjaga dan hak-hak CASN dapat terpenuhi dan terlindungi. Dalam hal ini Komisi II DPR RI dapat meminta kepada pemerintah agar koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat ditingkatkan, khususnya dalam mengawal kesiapan instansi untuk menuntaskan pengadaan CASN tahun 2024.

Penutup

Percepatan pengangkatan CASN tahun 2024 merupakan langkah krusial yang harus dilakukan, sebab penundaan dapat menimbulkan dampak merugikan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga pelayanan publik. Oleh sebab itu, agar percepatan ini berjalan efektif, diperlukan pengawasan menyeluruh untuk memastikan bahwa proses pengangkatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

DPR RI melalui Komisi II perlu mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang menjadi dasar percepatan pengangkatan CASN tahun 2024, guna memberikan kepastian hukum terhadap seluruh CASN 2024. Kementerian PANRB juga

perlu untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Manajemen ASN karena materi mengenai pengadaan CASN merupakan bagian dalam PP tersebut. Selain itu, melalui mekanisme rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN, Komisi II juga perlu mendorong Kementerian PANRB dan BKN untuk melakukan upaya perbaikan dalam setiap tahap seleksi, khususnya untuk mengantisipasi berbagai tantangan dalam pengadaan PPPK tahap II.

Referensi

- Adhinegara, B. Y., & Huda, N. (2025). Bagaimana nasib kami para CPNS? Menakar kerugian ekonomi penundaan pengangkatan CPNS. *Center of Economic and Law Studies (CELIOS)*. https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/03/CELIOS_Dampak-Ekonomi-Kisruh-Pengangkatan-CPNS.pdf
- Kementerian Sekretariat Negara. (2025, Maret 17). *Penjelasan lengkap Mensesneg tentang pengangkatan CASN 2024*. https://www.setneg.go.id/baca/index/penjelasan_lengkap_mensesneg_tentang_pengangkatan_casn_2024
- Marwah, H. (2025, Maret 17). Menteri PANRB: 213 instansi mengajukan penundaan pengangkatan ASN. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/menteri-panrb-213-instansi-mengajukan-penundaan-pengangkatan-asn-1220714>
- Nastitie, D. P. (2025a, Maret 7). Imbas penundaan pengangkatan CPNS, dari menganggur hingga potensi terganggunya birokrasi. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/imbaspnundaan-pengangkatan-cpns-dari-menganggur-hingga-potensi-terganggunya-birokrasi>
- Nastitie, D. P. (2025b, Maret 12). Pengangkatan CPNS ditunda, instansi pemerintah bersiasat atasi kekurangan pegawai. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/pengangkatan-cpns-ditunda-instansi-pemerintah-bersiasat-atasi-kekurangan-pegawai>

